

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Isu lingkungan, khususnya pencemaran sampah plastik di laut, telah menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir. Dampak pencemaran plastik tidak hanya mengancam ekosistem laut, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan sumber daya alam serta kehidupan manusia yang bergantung pada sektor kelautan. Dalam konteks ini, media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi sekaligus membentuk kesadaran publik mengenai krisis lingkungan yang terjadi. Cara media menyajikan dan mengemas isu lingkungan dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami permasalahan tersebut, termasuk menentukan aktor yang dianggap bertanggung jawab serta solusi yang dianggap relevan untuk mengatasi persoalan tersebut. Peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap isu lingkungan diperkuat oleh penelitian Maxwell Boykoff yang menunjukkan bahwa representasi media terhadap isu lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami urgensi krisis ekologis (Boykoff, M. T., 2009). Dalam penelitiannya mengenai pemberitaan perubahan iklim, Boykoff menemukan bahwa cara media membingkai isu lingkungan tidak hanya memengaruhi tingkat kesadaran publik, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami tanggung jawab moral dan politik terhadap lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *framing* media memiliki implikasi sosial yang signifikan dalam membentuk diskursus publik mengenai lingkungan (Boykoff, M. T., 2009).

Penelitian lain yang menyoroti pemberitaan isu lingkungan dalam media oleh Schäfer et al. (2022) menemukan bahwa media di Jerman cenderung menggunakan pendekatan visual yang emosional dalam memberitakan isu sampah plastik laut, seperti menampilkan gambar satwa laut yang terjerat plastik untuk membangun empati publik terhadap krisis lingkungan. Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pemberitaan media sering kali kurang memberikan konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi

permasalahan tersebut (Schäfer et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan lingkungan tidak selalu menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas persoalan ekologis.

Temuan serupa juga diungkapkan dalam penelitian oleh Vonk et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai polusi laut di berbagai negara sering kali bersumber dari siaran pers ilmiah. Akibatnya, *framing* yang muncul dalam berita cenderung bersifat teknokratis dan berfokus pada data ilmiah, sementara konteks sosial dan partisipasi masyarakat sering kali kurang mendapat perhatian (Vonc et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses konstruksi berita tidak hanya dipengaruhi oleh jurnalis, tetapi juga oleh sumber informasi yang digunakan dalam proses produksi berita (Vonc et al., 2024). Dalam konteks Asia Tenggara, kajian mengenai pemberitaan isu lingkungan masih menunjukkan keterbatasan baik dari segi fokus maupun pendekatan analisis. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada konteks nasional serta belum secara spesifik mengkaji isu sampah plastik di laut sebagai isu lintas batas yang memiliki implikasi regional dan global. Penelitian Chu dan Hamid (2010) mengkaji bagaimana media arus utama di Malaysia membingkai isu pengelolaan sampah dengan menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media lebih banyak menonjolkan perspektif pemerintah dibandingkan masyarakat sipil. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan media dalam mereproduksi narasi resmi (*official discourse*) sehingga peran aktor non-pemerintah menjadi kurang terlihat dalam pemberitaan (Chu & Hamid, 2010). Namun, penelitian ini masih terbatas pada konteks nasional dan belum membahas *framing* secara mendalam dalam isu spesifik seperti sampah plastik di laut (Chu & Hamid, 2010).

Selanjutnya, penelitian Baihaqi, Setiawan, dan Maspuroh (2022) di Indonesia menggunakan pendekatan analisis *framing* untuk melihat bagaimana media mengonstruksi isu sampah. Hasilnya menunjukkan bahwa media cenderung membingkai sampah sebagai masalah publik yang penyelesaiannya bergantung pada kebijakan pemerintah (Baihaqi et al., 2022). Meskipun menggunakan pendekatan *framing*, penelitian ini masih berfokus pada isu sampah domestik secara umum dan belum mengkaji dimensi laut sebagai bagian dari krisis lingkungan global (Baihaqi et al., 2022). Di tingkat internasional, penelitian

Spradlin dan Givens (2022) yang menganalisis pemberitaan perubahan iklim di media lokal Amerika Serikat menemukan bahwa media cenderung lebih menyoroti skala global dibandingkan solusi lokal yang relevan bagi masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan media dalam membangun narasi krisis atau *crisis-oriented framing* dibandingkan solusi atau *solution-oriented framing* (Spradlin dan Givens, 2022). Pola ini relevan untuk melihat kemungkinan kecenderungan serupa dalam pemberitaan isu sampah plastik di laut di Indonesia.

Penelitian lain oleh Anderson (2009) mengenai komunikasi perubahan iklim menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana isu lingkungan dipahami oleh publik melalui proses seleksi dan penonjolan informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *framing* media dapat memengaruhi tingkat perhatian publik dan urgensi suatu isu dalam agenda kebijakan (Anderson, 2009). Hal ini diperkuat oleh Boykoff (2011) yang menemukan bahwa media sering kali membingkai isu lingkungan dalam bentuk konflik atau kontroversi sehingga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kompleksitas masalah tersebut (Boykoff, 2011). Dalam konteks isu sampah plastik laut, penelitian Jambeck et al. (2015) memang lebih berfokus pada aspek lingkungan dan data kuantitatif, namun sering dijadikan rujukan dalam pemberitaan media global. Hal ini menunjukkan bahwa data ilmiah sering menjadi dasar *framing* media dalam mengangkat isu lingkungan (Jambeck et al., 2015). Namun demikian, bagaimana data tersebut dikonstruksi dalam narasi media masih jarang diteliti, khususnya dalam konteks media di Asia Tenggara.

Secara konseptual, pendekatan *framing* yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Entman (1993) yang menjelaskan bahwa *framing* merupakan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas dalam teks media. Entman mengidentifikasi empat elemen utama *framing*, yaitu *problem definition*, *causal interpretation*, *moral evaluation*, dan *treatment recommendation*. Selain itu, model *framing* Semetko dan Valkenburg (2000) juga digunakan untuk mengidentifikasi pola *framing* umum dalam media, seperti *conflict frame*, *responsibility frame*, *human interest frame*, *economic consequences frame*, dan *morality frame*. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan mendasar yang menjadi posisi penelitian ini. Pertama, dari

segi objek penelitian, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas isu lingkungan secara umum seperti perubahan iklim dan sampah domestik, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji isu sampah plastik di laut yang memiliki dimensi global dan lintas negara. Kedua, dari segi subjek media, penelitian ini berfokus pada media berbahasa Inggris di Indonesia, yaitu *The Jakarta Post*, yang memiliki karakteristik berbeda karena menjangkau audiens internasional. Ketiga, dari segi pendekatan analisis, penelitian ini menggunakan analisis *framing* untuk mengkaji bagaimana realitas dikonstruksi dalam pemberitaan, tidak hanya melihat isi tetapi juga struktur makna yang dibangun oleh media.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kebaruan dalam melihat media sebagai representasi Indonesia di tingkat global. *The Jakarta Post* tidak hanya berfungsi sebagai media nasional, tetapi juga sebagai jendela informasi bagi komunitas internasional. Oleh karena itu, *framing* yang dilakukan oleh media ini berpotensi memengaruhi persepsi global terhadap isu lingkungan di Indonesia, termasuk bagaimana Indonesia diposisikan dalam krisis sampah plastik laut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah penelitian, khususnya dalam kajian mengenai bagaimana media berbahasa Inggris di Indonesia membingkai isu sampah plastik di laut. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi realitas lingkungan dalam media, serta kontribusinya dalam membentuk diskursus publik baik di tingkat nasional maupun global.

## 2.2 Konsep Framing

Konsep *framing* merupakan pendekatan sentral dalam studi komunikasi yang menjelaskan bahwa realitas sosial yang disampaikan melalui media bukanlah representasi objektif, melainkan hasil konstruksi yang melalui proses seleksi, penekanan, dan penyusunan informasi. Dengan demikian, *framing* menegaskan bahwa berita adalah produk interpretatif, di mana realitas telah “dibentuk” sebelum sampai kepada audiens. Proses ini menjadikan media memiliki peran aktif dalam membangun makna sosial, bukan sekadar menyampaikan fakta. Pemahaman awal mengenai *framing* berasal dari pemikiran Erving Goffman (1974) yang memperkenalkan konsep *frame of interpretation*. Goffman memandang bahwa individu tidak memahami realitas secara langsung karena realitas bersifat kompleks dan tidak terstruktur. Oleh karena itu, manusia menggunakan “kerangka interpretasi” sebagai alat kognitif untuk mengorganisasi pengalaman sosial. *Frame* dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme penyederhanaan realitas, yang memungkinkan individu menentukan apa yang relevan dan bagaimana suatu peristiwa harus dimaknai. Implikasi penting dari pemikiran ini adalah bahwa *framing* bukan hanya fenomena media, tetapi merupakan bagian dari proses kognitif manusia. Ketika media hadir, ia tidak menciptakan *framing* dari nol, melainkan memengaruhi dan membentuk kerangka interpretasi yang sudah dimiliki oleh individu.

Konsep ini kemudian dikembangkan dalam studi media oleh Todd Gitlin (1980), yang mengadaptasi gagasan Goffman ke dalam konteks produksi berita. Gitlin menekankan bahwa *framing* merupakan proses institusional yang dilakukan media dalam memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Dalam perspektif ini, *framing* tidak lagi sekadar proses kognitif individu, tetapi menjadi praktik sosial yang dilakukan oleh organisasi media. Media memiliki kekuatan untuk menentukan isu mana yang dianggap penting (*agenda building*) serta bagaimana isu tersebut harus dipahami oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa *framing* memiliki dimensi kekuasaan (*power dimension*), karena media dapat mengarahkan perhatian publik sekaligus membatasi cara pandang terhadap suatu isu. Dengan kata lain, *framing* merupakan bagian dari proses konstruksi realitas sosial yang tidak terlepas dari kepentingan ideologis, ekonomi, dan politik.

Definisi *framing* yang paling sistematis dan banyak digunakan dikemukakan oleh Robert Entman (1993). Entman menjelaskan bahwa *framing* terdiri dari dua mekanisme utama, yaitu seleksi (*selection*) dan penonjolan (*salience*). Seleksi berarti media memilih aspek tertentu dari realitas, sementara penonjolan berarti media membuat aspek tersebut lebih terlihat, lebih bermakna, dan lebih mudah diingat oleh audiens. Lebih jauh, Entman menguraikan empat fungsi utama *framing*, yaitu mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, membuat penilaian moral, dan menawarkan solusi. Keempat fungsi ini menunjukkan bahwa *framing* tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga mengarahkan interpretasi dan penilaian publik. Dengan demikian, *framing* memiliki sifat normatif karena secara implisit memengaruhi bagaimana publik seharusnya memahami dan merespons suatu isu. Dalam konteks ini, *framing* menjadi alat yang sangat kuat dalam membentuk opini publik dan bahkan memengaruhi arah kebijakan.

Sementara itu, William Gamson dan Andre Modigliani (1989) melihat *framing* sebagai *interpretive packages*, yaitu kumpulan ide, simbol, metafora, dan narasi yang digunakan untuk memberi makna pada isu publik. Pendekatan ini menekankan bahwa *framing* tidak hanya berada pada level teks, tetapi juga dalam struktur budaya dan diskursus sosial yang lebih luas. Media dalam hal ini berperan sebagai bagian dari sistem budaya yang memproduksi makna melalui simbol dan narasi. Oleh karena itu, *framing* tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, penggunaan istilah “krisis plastik” atau “bencana lingkungan” bukan hanya deskripsi, tetapi juga bentuk konstruksi makna yang membangun persepsi tertentu dalam masyarakat. Pendekatan ini memperluas pemahaman *framing* dari sekadar teknik jurnalistik menjadi proses kultural yang membentuk cara masyarakat memahami realitas.

Pendekatan yang lebih struktural dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993), yang melihat *framing* sebagai struktur dalam teks berita. Mereka mengidentifikasi empat dimensi utama *framing*, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Struktur sintaksis berkaitan dengan bagaimana elemen berita seperti judul dan *lead* disusun untuk menarik perhatian dan menentukan fokus. Struktur skrip berkaitan dengan alur narasi yang

membentuk pemahaman pembaca terhadap peristiwa. Struktur tematik mencerminkan ide utama atau pesan yang ingin disampaikan, sementara struktur retorik berkaitan dengan penggunaan bahasa, metafora, dan simbol yang dapat memengaruhi emosi audiens. Pendekatan ini penting karena memberikan kerangka analisis yang konkret dan sistematis, sehingga *framing* dapat diukur dan dianalisis secara empiris dalam penelitian media.

Jika dibandingkan, masing-masing teori *framing* memberikan perspektif yang saling melengkapi. Goffman menekankan aspek kognitif individu, Gitlin menyoroti proses produksi media dan relasi kekuasaan, Entman memberikan kerangka analisis yang sistematis dan operasional, Gamson menekankan dimensi budaya dan simbolik, sedangkan Pan dan Kosicki menawarkan pendekatan struktural dalam analisis teks. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *framing* merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek kognitif, sosial, budaya, dan struktural.

### 2.1.1 Konstruksi Framing

Konsep *framing* menurut Holli A. Semetko dan Patti M. Valkenburg (2000) merujuk pada proses sistematis di mana media massa membentuk realitas melalui penekanan aspek tertentu dari suatu isu sehingga menghasilkan interpretasi tertentu di benak audiens (Semetko & Valkenburg, 2000). Dalam penelitian mereka, *framing* dipahami sebagai cara media menyusun dan menyajikan informasi dengan menonjolkan elemen-elemen tertentu, sementara elemen lainnya diminimalkan atau diabaikan (Semetko & Valkenburg, 2000). Dengan demikian, konstruksi *framing* bukan sekadar proses penyampaian informasi, melainkan proses pembentukan makna yang secara aktif memengaruhi cara publik memahami suatu peristiwa (Semetko & Valkenburg, 2000).

Lebih lanjut, Holli A. Semetko dan Patti M. Valkenburg (2000) menekankan bahwa *framing* merupakan bagian dari praktik jurnalistik yang bersifat rutin dan berpola, sehingga media cenderung menggunakan pola-pola tertentu dalam membingkai isu (Semetko & Valkenburg, 2000). Pola tersebut dikenal sebagai *generic frames*, yaitu bingkai umum yang dapat ditemukan

dalam berbagai jenis pemberitaan, baik isu politik, ekonomi, maupun lingkungan (Semetko & Valkenburg, 2000). Lebih lanjut, konsep *generic frames* yang dikemukakan oleh Holli A. Semetko dan Patti M. Valkenburg (2000) merujuk pada pola-pola pembingkai yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai isu lintas konteks pemberitaan. *Generic frames* berbeda dari *issue-specific frames* karena tidak terbatas pada satu topik tertentu, melainkan merupakan bentuk konstruksi yang berulang dalam praktik jurnalistik sehari-hari (Semetko & Valkenburg, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki kecenderungan struktural dalam membingkai realitas, di mana pola-pola tertentu digunakan secara konsisten untuk menyederhanakan kompleksitas isu agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Secara lebih mendalam, *generic frames* berfungsi sebagai “*template interpretatif*” yang membantu media dalam mengorganisasi informasi. Dengan adanya pola yang berulang, media dapat secara cepat menentukan sudut pandang pemberitaan tanpa harus membangun kerangka baru setiap kali melaporkan suatu isu. Dalam konteks ini, *generic frames* tidak hanya mempermudah proses produksi berita, tetapi juga menciptakan konsistensi dalam cara media menyampaikan realitas. Namun, konsekuensinya adalah realitas yang disajikan menjadi terstruktur dalam pola tertentu, sehingga berpotensi membatasi keragaman perspektif yang diterima publik (Semetko & Valkenburg, 2000).

Selain itu, penggunaan *generic frames* juga berkaitan erat dengan proses institusional dalam media, seperti rutinitas redaksi, nilai berita, serta tekanan waktu dalam produksi berita. Oleh karena itu, *framing* tidak selalu merupakan hasil keputusan individual jurnalis, tetapi juga merupakan produk dari sistem media secara keseluruhan. Dalam hal ini, konstruksi *framing* mencerminkan bagaimana media sebagai institusi mengelola kompleksitas realitas menjadi bentuk yang lebih sederhana dan komunikatif. Dalam hal ini, konstruksi *framing* dipahami sebagai hasil dari proses seleksi informasi, penekanan aspek tertentu, serta pengulangan pola *framing* yang secara konsisten digunakan oleh media dalam membangun realitas sosial (Semetko & Valkenburg, 2000). Secara konseptual, konstruksi *framing* menurut Holli A. Semetko dan Patti M. Valkenburg (2000) melibatkan dua dimensi utama, yaitu seleksi (*selection*) dan

penekanan (*emphasis*), yang merupakan inti dari proses pembentukan makna dalam media. Dimensi seleksi merujuk pada proses di mana media memilih fakta, aktor, atau sudut pandang tertentu dari suatu peristiwa untuk dimasukkan ke dalam berita. Proses ini bersifat eksklusif, karena tidak semua informasi dapat dimasukkan ke dalam teks berita. Oleh karena itu, seleksi secara langsung menentukan batasan realitas yang akan disajikan kepada publik (Semetko & Valkenburg, 2000).

Lebih lanjut, seleksi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan fakta, tetapi juga mencakup pemilihan sumber informasi, kutipan, serta konteks yang digunakan dalam pemberitaan. Misalnya, dalam isu sampah plastik di laut, media dapat memilih untuk lebih banyak mengutip pemerintah dibandingkan aktivis lingkungan, sehingga membentuk perspektif tertentu dalam berita. Dengan demikian, seleksi merupakan tahap awal yang sangat menentukan arah *framing*, karena apa yang tidak dipilih akan menjadi “realitas yang tidak terlihat” bagi audiens.

Sementara itu, dimensi penekanan (*emphasis*) berkaitan dengan bagaimana media memberikan bobot lebih pada aspek tertentu dari informasi yang telah dipilih. Penekanan dilakukan melalui berbagai cara, seperti penempatan informasi di awal berita (*headline* dan *lead*), penggunaan bahasa yang kuat, pengulangan informasi, serta penggunaan metafora atau simbol tertentu. Menurut Semetko dan Valkenburg (2000), penekanan ini berfungsi untuk meningkatkan *salience*, yaitu tingkat keterlibatan dan kepentingan suatu informasi di mata audiens. Dengan adanya penekanan, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan perhatian dan interpretasi publik terhadap aspek tertentu dari realitas. Sebagai contoh, jika media terus-menerus menekankan dampak ekonomi dari sampah plastik, maka audiens cenderung memahami isu tersebut sebagai masalah ekonomi, bukan semata-mata masalah lingkungan. Dalam hal ini, penekanan berperan dalam membentuk prioritas kognitif audiens, yaitu apa yang dianggap penting dan relevan.

Kombinasi antara seleksi dan penekanan menghasilkan konstruksi realitas yang tidak netral, melainkan telah melalui proses penyaringan dan

penguatan makna. Realitas yang diterima publik pada akhirnya merupakan hasil dari apa yang dipilih untuk ditampilkan dan bagaimana hal tersebut ditampilkan. Oleh karena itu, konstruksi *framing* menurut Holli A. Semetko dan Patti M. Valkenburg (2000) dapat dipahami sebagai proses dinamis yang melibatkan reduksi kompleksitas realitas sekaligus penguatan makna tertentu melalui pola-pola *framing* yang berulang dalam media massa. Selanjutnya, kontribusi utama Holli A. Semetko dan Patti M. Valkenburg (2000) dalam kajian *framing* terletak pada upaya mereka mengoperasionalkan konsep *framing* ke dalam bentuk yang dapat diukur secara empiris melalui indikator berbasis pertanyaan (*yes/no questions*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi keberadaan *frame* dalam teks berita secara sistematis dan objektif sehingga *framing* tidak hanya dipahami sebagai konsep teoretis, namun berfungsi sebagai alat analisis dalam penelitian kuantitatif (Semetko & Valkenburg, 2000).

Dengan demikian, konstruksi *framing* menurut Holli A. Semetko dan Patti M. Valkenburg (2000) dapat dipahami sebagai proses terstruktur yang melibatkan seleksi, penekanan, dan pengulangan pola dalam pemberitaan media, yang pada akhirnya membentuk cara pandang publik terhadap suatu isu (Semetko & Valkenburg, 2000). Pendekatan ini menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam mengonstruksi realitas sosial, sekaligus memengaruhi persepsi dan interpretasi audiens terhadap peristiwa yang diberitakan (Semetko & Valkenburg, 2000). Holli A. Semetko dan Patti M. Valkenburg (2000) juga memformulasikan lima bingkai utama yang kerap digunakan dalam studi media, yaitu *responsibility frame*, *conflict frame*, *economic consequences frame*, *human interest frame*, dan *morality frame*.

**a. Responsibility Frame**

*Responsibility frame* adalah bingkai yang menampilkan suatu isu dengan menekankan siapa yang bertanggung jawab atas penyebab atau penyelesaian suatu masalah. Dalam bingkai ini, media biasanya mengaitkan permasalahan dengan peran pemerintah, individu, organisasi, atau kelompok tertentu (Semetko & Valkenburg, 2000).

**b. Conflict Frame**

*Conflict frame* merupakan bingkai yang menekankan adanya konflik, perbedaan pendapat, atau pertentangan antara individu, kelompok, organisasi, atau negara. Tujuan dari penggunaan bingkai ini adalah untuk menarik perhatian audiens dengan menyoroti dinamika persaingan atau perdebatan yang terjadi dalam suatu isu (Semetko & Valkenburg, 2000).

**c. Economic Consequences Frame**

*Economic consequences frame* adalah bingkai yang menampilkan suatu isu berdasarkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh peristiwa atau masalah tertentu terhadap individu, kelompok, institusi, wilayah, atau negara (Semetko & Valkenburg, 2000).

**d. Human Interest Frame**

*Human interest frame* adalah bingkai yang menekankan aspek kemanusiaan dan emosional dalam pemberitaan suatu isu. Bingkai ini biasanya menghadirkan kisah individu atau kelompok tertentu untuk memberikan “wajah manusia” pada suatu peristiwa sehingga lebih mudah dipahami dan dirasakan oleh audiens (Semetko & Valkenburg, 2000).

**e. Morality Frame**

*Morality frame* adalah bingkai yang menampilkan suatu isu dalam konteks nilai moral, norma sosial, atau ajaran agama. Dalam bingkai ini, suatu peristiwa sering dikaitkan dengan pertanyaan mengenai benar atau salah secara moral (Semetko & Valkenburg, 2000).

### **2.1.2 Konsep Jurnalisme Lingkungan**

Jurnalisme lingkungan atau *environmental journalism* merupakan praktik jurnalistik yang menyoroti isu-isu ekologis dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik dan mendorong tanggung jawab sosial terhadap alam. Menurut Anders Hansen (2010), jurnalisme lingkungan berfungsi sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan

masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa jurnalisme lingkungan memiliki peran translasi (*translation role*), yaitu menerjemahkan informasi ilmiah yang kompleks, seperti data tentang pencemaran atau perubahan iklim, ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, jurnalis tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mediator pengetahuan (*knowledge broker*). Selain itu, Hansen menekankan konteks sosial dan urgensi ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan lingkungan harus mampu mengaitkan data ilmiah dengan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, serta menyoroti pentingnya isu tersebut secara berkelanjutan dalam ruang publik.

Liang Chen dan Jingyuan She (2022) menambahkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah memperluas ruang bagi jurnalisme lingkungan. Namun, sekaligus memperlihatkan ketimpangan antara media di negara maju dan berkembang dalam menyuarakan krisis ekologis. Zschache dan Brüggemann (2015) juga menekankan bahwa praktik jurnalisme lingkungan yang ideal menuntut keseimbangan antara informasi ilmiah, kebijakan, dan suara masyarakat, agar publik dapat memahami isu lingkungan secara rasional dan berbasis bukti. Penelitian ini relevan karena secara langsung berkaitan dengan peran media dalam membentuk kesadaran publik mengenai isu sampah plastik laut. Isu ini juga bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga sosial dan politik. Selain aspek teknologis dan struktural, kualitas jurnalisme lingkungan juga ditentukan oleh keseimbangan informasi yang disajikan. Zschache dan Brüggemann (2015) menekankan bahwa jurnalisme lingkungan yang ideal harus mampu menghadirkan informasi ilmiah yang akurat, analisis kebijakan yang kritis, dan suara masyarakat terdampak secara seimbang.

Secara konseptual, jurnalisme lingkungan memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari praktik jurnalistik lainnya. Pertama, jurnalisme lingkungan berbasis pada fakta ilmiah, sehingga membutuhkan kemampuan jurnalis dalam memahami dan menerjemahkan data ilmiah ke dalam bahasa yang mudah dipahami publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Anders Hansen (2010) yang menekankan bahwa jurnalisme lingkungan harus mampu menjembatani kompleksitas ilmu pengetahuan

dengan kebutuhan informasi masyarakat luas. Kedua, jurnalisme ini bersifat interdisipliner karena melibatkan aspek ekologi, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Menurut Robert Cox (2013), komunikasi lingkungan, termasuk jurnalisme di dalamnya, selalu berada dalam persimpangan berbagai kepentingan dan disiplin ilmu, sehingga pemahaman yang holistik menjadi sangat penting dalam proses pemberitaan.

Ketiga, jurnalisme lingkungan mengedepankan prinsip keberlanjutan (*sustainability*), yaitu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Prinsip ini selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh *World Commission on Environment and Development* (1987), yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan. Keempat, jurnalisme lingkungan memiliki orientasi advokasi, dalam arti mendorong perubahan sosial dan kebijakan yang lebih pro-lingkungan, meskipun tetap menjaga prinsip objektivitas jurnalistik. Michael Frome (1998) menegaskan bahwa jurnalisme lingkungan tidak dapat sepenuhnya netral karena memiliki tanggung jawab moral dalam melindungi lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Selain itu, dalam praktiknya, jurnalisme lingkungan juga berkaitan erat dengan konsep *framing*. Media dapat memilih untuk menyoroti aspek tertentu, seperti krisis, solusi, konflik, atau tanggung jawab aktor tertentu. Pilihan *framing* ini akan memengaruhi bagaimana publik memahami isu lingkungan. Hal ini sejalan dengan teori *framing* dari Robert Entman (1993) yang menyatakan bahwa *framing* menentukan bagaimana suatu realitas dikonstruksi dan ditafsirkan oleh khalayak.

Konsep jurnalisme lingkungan juga relevan secara langsung dengan isu sampah plastik laut, yang tidak hanya merupakan persoalan ekologis, melainkan juga sosial, ekonomi, dan politik. Berbagai studi internasional, seperti Jambeck et al. (2015), menunjukkan bahwa sampah plastik laut merupakan hasil interaksi antara perilaku konsumen, ketidakcukupan infrastruktur pengelolaan sampah, arus perdagangan global, dan kebijakan pemerintah yang tidak efektif. Artinya, media memiliki peran penting untuk mengungkap kompleksitas ini kepada publik. Terlebih dalam konteks

Indonesia yang merupakan salah satu kawasan penyumbang sampah plastik di laut. Melalui konsep jurnalisme lingkungan, penelitian ini dapat melihat sejauh mana media *The Jakarta Post* menjalankan fungsi edukatif dan advokatif dalam memberitakan masalah sampah laut, terkait apakah media berperan sebagai agen perubahan lingkungan atau justru memperkuat narasi pemerintah dan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, dalam konteks sampah plastik laut, ini berarti jurnalisme yang baik tidak hanya memberitakan fenomena polusi di permukaan, tetapi juga menjelaskan rantai penyebabnya, misalnya konsumsi plastik berlebih, lemahnya sistem pengelolaan sampah, praktik industri yang tidak berkelanjutan, atau ketidakmerataan kebijakan lingkungan.

### 2.1.3 Konsep Eco-framing

Konsep *eco-framing* atau *environmental framing* merupakan pengembangan dari teori *framing* yang menitikberatkan pada konstruksi makna isu lingkungan dalam pemberitaan media. Dalam konteks ini, media tidak hanya memilih fakta, tetapi juga menentukan cara publik memahami hubungan antara manusia dan lingkungan melalui bingkai moral, ilmiah, politik, maupun ekonomi. Nisbet (2009) menegaskan bahwa *eco-framing* menjelaskan bagaimana bingkai-bingkai tertentu digunakan untuk memengaruhi persepsi publik, menentukan aktor yang dianggap bertanggung jawab, dan membentuk gambaran solusi atas suatu masalah lingkungan. Dengan kata lain, *eco-framing* tidak hanya menjelaskan apa yang diberitakan media, tetapi juga bagaimana dan mengapa berita tersebut dibingkai dalam bentuk tertentu.

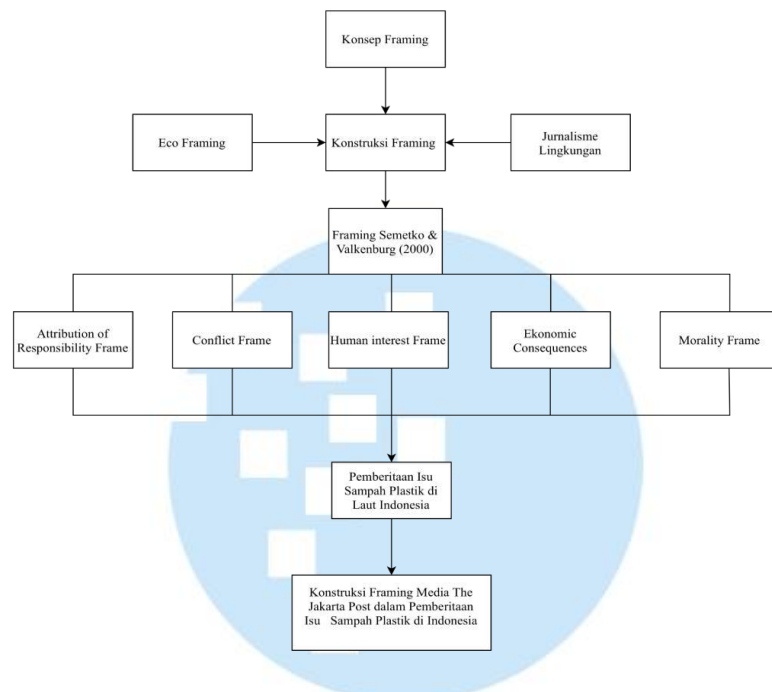
Hal serupa juga dikemukakan oleh Boykoff (2015) yang menyatakan bahwa pemberitaan lingkungan tidak bersifat pasif atau informatif semata. Sebaliknya, *framing* lingkungan menghasilkan hubungan moral dan emosional yang dapat menggugah rasa urgensi publik. Misalnya, ketika media menampilkan visual penyu terjerat plastik atau ikan dengan mikroplastik di organ tubuhnya, *frame* tersebut menciptakan resonansi moral yang memperkuat kepedulian publik (Boykoff, 2015). Sementara itu, Lakoff (2010) melalui *Why It Matters How We Frame the Environment* menegaskan bahwa bingkai lingkungan pada dasarnya adalah narasi moral. Ketika media membingkai isu

ekologis sebagai “krisis moral bersama”, publik lebih terdorong untuk bertindak secara kolektif. Namun, ketika isu lingkungan dibingkai sebagai persoalan teknis atau administratif, tanggung jawab publik dialihkan kepada pemerintah atau ilmuwan, yang membuat masyarakat kehilangan *sense of agency* atau motivasi untuk terlibat.

Penelitian Vonk, Bos, dan van Seville (2025) juga menunjukkan bahwa media sering kali mengadopsi bingkai langsung dari *press release* ilmiah, terutama dalam peliputan tentang polusi plastik laut. Akibatnya, narasi yang muncul dalam berita cenderung berpusat pada suara ilmuwan dan data ilmiah. Sementara itu, konteks sosial, politik, dan suara kelompok terdampak kurang muncul dalam pemberitaan. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa *eco-framing* tidak hanya ditentukan oleh jurnalis, tetapi juga oleh sumber yang mereka pilih sebagai rujukan utama. Hal serupa juga dipertegas oleh Colijn et al. (2022) yang menyatakan bahwa *framing* media juga memengaruhi pemahaman publik tentang masa depan plastik, terutama dalam konteks ekonomi sirkular. Media sering mengemas narasi tentang penanganan sampah plastik sebagai peluang ekonomi atau inovasi industri, bukan sebagai krisis ekologis struktural. Hal ini menunjukkan bagaimana *eco-framing* dapat menghasilkan narasi optimistik yang mendukung kepentingan ekonomi, sekaligus meredam kritik terhadap kebijakan lingkungan yang lemah.

## 2.2 Alur Penelitian

Gambar 2. 1 Alur Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti

